

SUMMARY

Kajian Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016)

Created by INSAN FIRDAUS

Subject : Kewenangan mahkamah konstitusi, pemilihan kepala daerah,
Subject Alt : The authority of the constitutional court, the local elections,
Keyword : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Pilkada, Kabupaten Halmahera Selatan

Description :

Setiap permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Salah satu syarat prosedural yang harus dipenuhi yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Objek permohonan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Penetapan Perolehan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, karena ada ketidakpastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana tinjauan yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dibatalkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan, agar Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu direvisi khususnya terkait dengan ketentuan tentang objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan kewenangan KPU pusat dan/atau KPU Provinsi untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten tentang penetapan hasil pemilihan.

Contributor : Wasis Susetio
Date Create : 04/03/2017
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Master-201404031
Collection : 201404031

Source : Master Theses of Law

Relation Collection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademi Universitas Esa Unggul

Right : @perpustakaan universitas esa unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor